



Perspektif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan Terhadap Praktik Money Politik

The Perspective of Students from the Geography Education Department at Medan State University on Money Politics Practices

**Sahala Fransiskus Marbun^{1*}, Asih Ester E. G Harahap², Desty Novry Lianty³,
Rusniatri Hasugian⁴, Ipantri Naibaho⁵**

Universitas Negeri Medan

Email: sahala@unimed.ac.id¹, esterharahap00@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 25-03-2025

Revised : 27-03-2025

Accepted : 31-03-2025

Published : 02-04-2025

Abstract

The practice of money politics in Indonesia, particularly in the context of Regional Head Elections (Pilkada), refers to the use of material incentives, such as money or goods, to influence voters' choices, often driven by weak regulations and a political culture that accepts this practice as commonplace. This study aims to explore the understanding and perspectives of Geography Education students at Universitas Negeri Medan regarding money politics practices. Through a survey involving 126 respondents, eight questions were posed to gather comprehensive data. The results of this study provide a clear picture of students' understanding and views on money politics. Despite high awareness, there remains a need to deepen understanding and encourage active involvement in prevention efforts.

Keywords : Money Politics, Students, Perspective

Abstrak

Praktik money politics di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merujuk pada penggunaan insentif material, seperti uang atau barang, untuk memengaruhi pilihan pemilih, yang sering kali disebabkan oleh regulasi yang lemah dan budaya politik yang menerima praktik ini sebagai hal yang biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan pandangan mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan mengenai praktik money politics. Melalui survei yang melibatkan 126 responden, delapan pertanyaan diajukan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap praktik *money politics*. Meskipun terdapat kesadaran yang tinggi, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan.

Kata Kunci: Money Politic, Mahasiswa, Perspektif

PENDAHULUAN

Geografi politik merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan kekuasaan, serta bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi dinamika politik di suatu wilayah. Ilmu geografi politik merupakan kajian yang meneliti potensi yang dimiliki suatu bangsa berdasarkan identitas dan karakteristiknya, yang berfungsi sebagai kekuatan dan



kemampuan dalam menjaga ketahanan nasional. Geopolitik mengajarkan pentingnya menciptakan persatuan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan demi kepentingan nasional. Sebagai sebuah disiplin ilmu, geografi politik memberikan pemahaman objektif mengenai posisi Indonesia sebagai bangsa yang berinteraksi dengan negara lain di dunia. Dalam konteks ekonomi global, ketergantungan antar negara menjadi tantangan yang tak terhindarkan, sehingga penerapan konsep geografi politik dalam perkembangan ekonomi Indonesia tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan ruang lingkungannya. Pemahaman mengenai kekuatan dan kekuasaan di Indonesia berlandaskan pada konsep perang dan damai, yang disesuaikan dengan kondisi geografis yang ada. Selain itu, Indonesia mengadopsi paham negara kepulauan, yang berbeda dengan konsep archipelago yang umumnya diterapkan di negara-negara Barat (Yanuar, F., et al, 2024). Dalam konteks Indonesia, praktik money politics atau politik uang menjadi isu yang semakin relevan, terutama menjelang pemilihan umum. Praktik ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi, dan dapat merusak integritas sistem politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami perspektif mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan terhadap fenomena ini, mengingat mereka adalah generasi penerus yang akan berperan dalam pembangunan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Metode survei digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan terhadap praktik money politics. Dengan menggunakan survei, peneliti dapat menjangkau responden dalam jumlah yang lebih besar dan memperoleh data yang representatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti menggunakan teknik sampling acak sederhana. Total responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 126 orang. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dari berbagai angkatan dan kelas, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mencerminkan pandangan mahasiswa secara keseluruhan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun dalam bentuk Google Form. Kuesioner terdiri dari delapan pertanyaan yang dirancang untuk menggali pandangan mahasiswa mengenai praktik money politics. Kuesioner dirancang dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan. Skala ini terdiri dari lima pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form. Kuesioner disebarkan kepada mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan melalui media sosial dan grup WhatsApp. Peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan pentingnya partisipasi responden. Responden diberikan waktu selama dua minggu untuk mengisi kuesioner. Setelah



periode pengumpulan data berakhir, peneliti mengumpulkan dan menyimpan data yang telah diperoleh untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang terkumpul dari kuesioner akan dianalisis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Analisis deskriptif akan dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan memberikan gambaran umum mengenai pandangan mahasiswa terhadap praktik money politics. Data akan diolah untuk menghitung frekuensi dan persentase dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Selain itu, analisis grafik juga akan dilakukan untuk memvisualisasikan hasil survei, sehingga memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian. Peneliti akan memastikan bahwa partisipasi responden bersifat sukarela dan anonim. Sebelum mengisi kuesioner, responden akan diberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan hak-hak mereka sebagai partisipan. Peneliti juga akan menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan pandangan mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan mengenai praktik money politics. Melalui survei yang melibatkan 126 responden, delapan pertanyaan diajukan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian:

1. Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan praktik money politics?

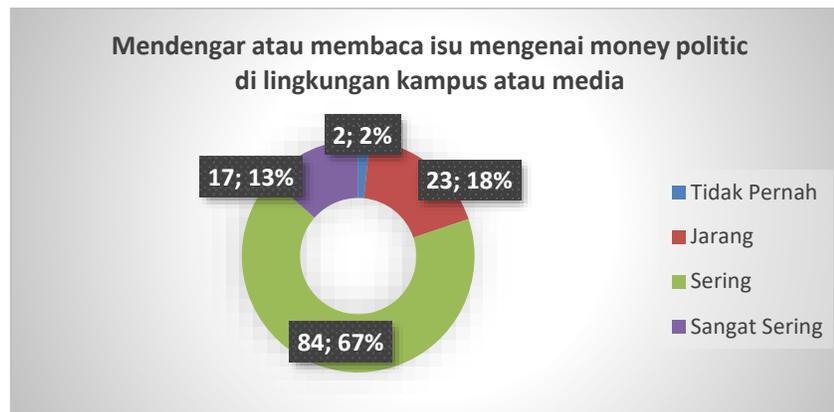
- Ya:** 125 responden (99%)
- Tidak:** 1 responden (1%)



Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memiliki pemahaman mengenai praktik money politics.

2. Seberapa sering Anda mendengar atau membaca isu mengenai money politics di lingkungan kampus atau media?

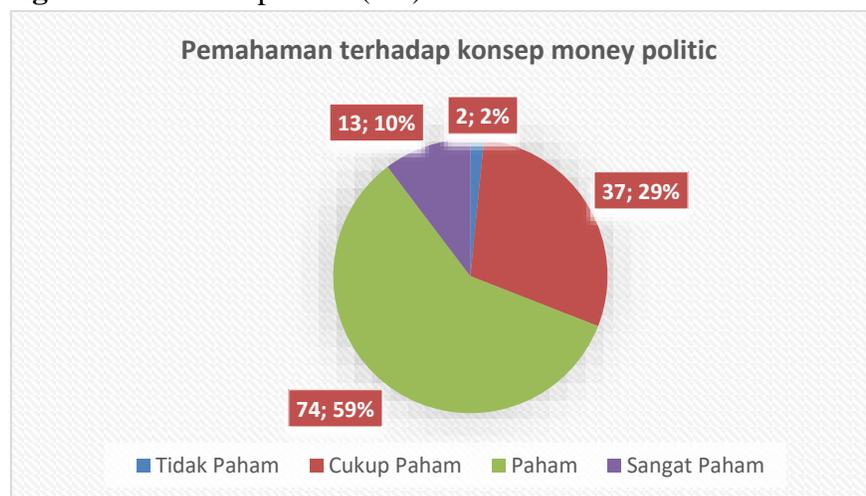
- Tidak Pernah:** 2 responden (2%)
- Jarang:** 17 responden (13%)
- Sering:** 23 responden (18%)
- Sangat Sering:** 84 responden (67%)



Sebagian besar responden, yaitu 67%, melaporkan bahwa mereka sering atau sangat sering mendengar atau membaca isu mengenai money politics.

3. Sejah mana pemahaman Anda terhadap konsep money politics?

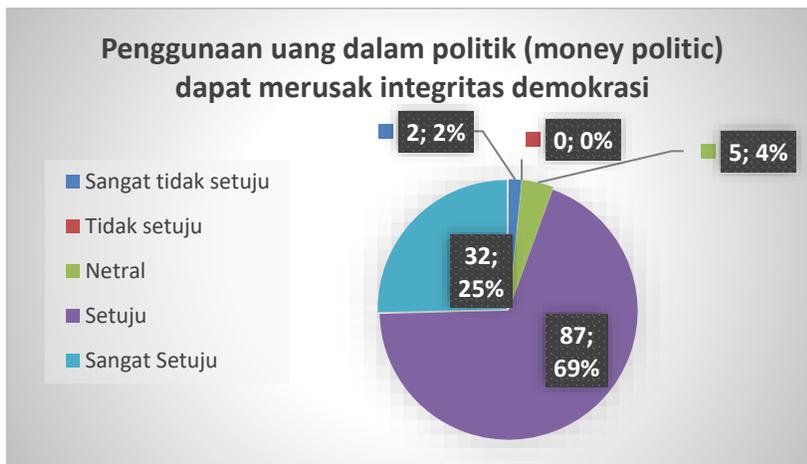
- a. **Tidak Paham:** 74 responden (59%)
- b. **Cukup Paham:** 13 responden (10%)
- c. **Paham:** 37 responden (29%)
- d. **Sangat Paham:** 2 responden (2%)



Mayoritas responden (59%) tidak paham mengenai konsep money politics, menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman di kalangan mahasiswa.

4. Penggunaan uang dalam politik (money politics) dapat merusak integritas demokrasi.

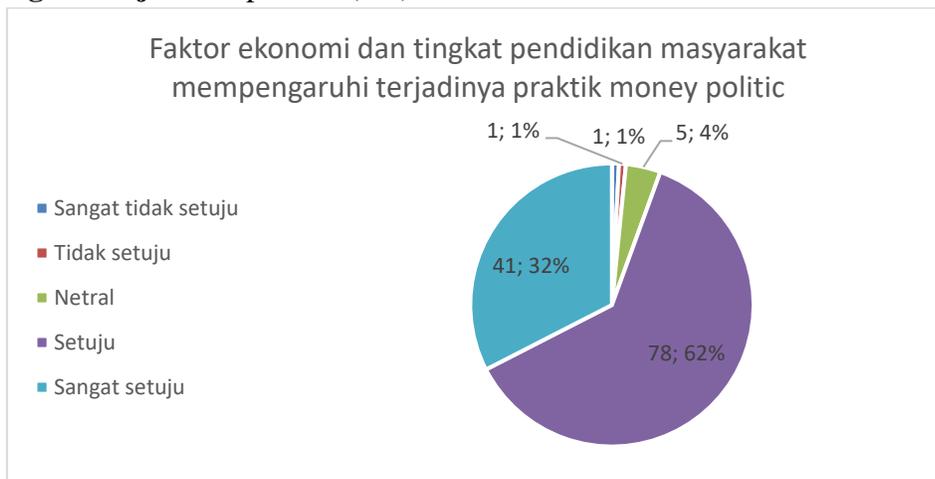
- a. **Sangat Tidak Setuju:** 2 responden (2%)
- b. **Tidak Setuju:** 0 responden (0%)
- c. **Netral:** 32 responden (25%)
- d. **Setuju:** 87 responden (69%)
- e. **Sangat Setuju:** 5 responden (4%)



Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (69%) setuju atau sangat setuju bahwa penggunaan uang dalam politik dapat merusak integritas demokrasi.

5. Faktor ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi terjadinya praktik money politics.

- a. **Sangat Tidak Setuju:** 1 responden (1%)
- b. **Tidak Setuju:** 41 responden (32%)
- c. **Netral:** 1 responden (1%)
- d. **Setuju:** 78 responden (62%)
- e. **Sangat Setuju:** 5 responden (4%)



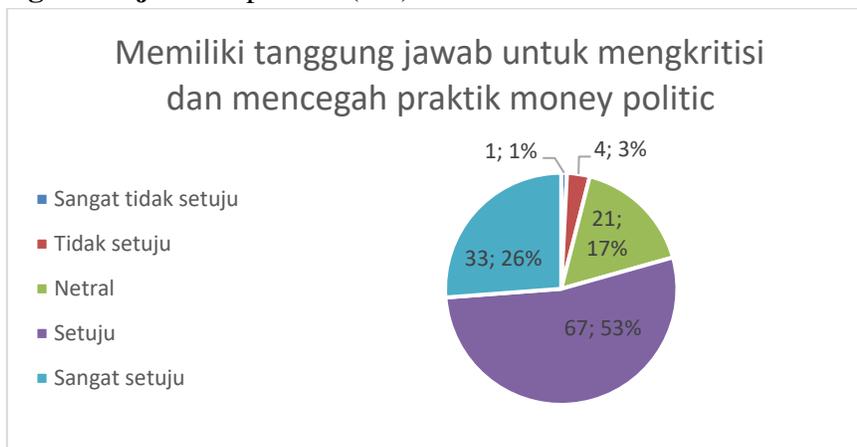
Sebagian besar responden (62%) setuju atau sangat setuju bahwa faktor ekonomi dan pendidikan berperan dalam praktik money politics.

6. Memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan mencegah praktik money politics.

- a. **Sangat Tidak Setuju:** 1 responden (1%)
- b. **Tidak Setuju:** 33 responden (26%)
- c. **Netral:** 21 responden (17%)



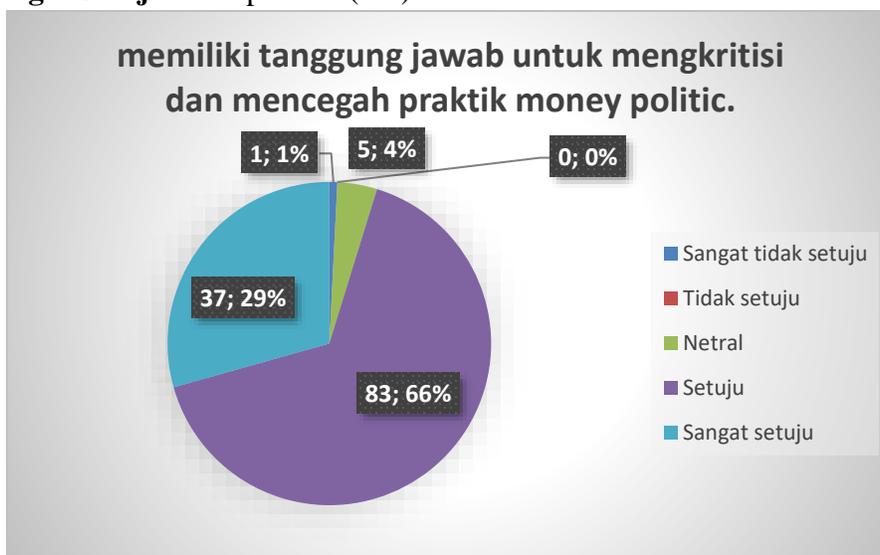
- d. **Setuju:** 67 responden (53%)
- e. **Sangat Setuju:** 4 responden (3%)



Hasil menunjukkan bahwa 53% responden merasa memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan mencegah praktik money politics.

7. Praktik money politics sangat berdampak negatif terhadap kebijakan publik di tingkat nasional.

- a. **Sangat Tidak Setuju:** 1 responden (1%)
- b. **Tidak Setuju:** 46 responden (36%)
- c. **Netral:** 1 responden (1%)
- d. **Setuju:** 74 responden (59%)
- e. **Sangat Setuju:** 4 responden (3%)



8. Sejauh mana Anda merasa terlibat dalam upaya mencegah praktik money politics?

- a. **Sangat Tidak Terlibat:** 2 responden (2%)
- b. **Tidak Terlibat:** 10 responden (8%)



- c. **Netral:** 20 responden (16%)
- d. **Terlibat:** 80 responden (63%)
- e. **Sangat Terlibat:** 14 responden (11%)



Hasil menunjukkan bahwa 63% responden merasa terlibat dalam upaya mencegah praktik money politics.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dari delapan pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan mengenai praktik *money politics*. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pemahaman, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap isu yang sangat relevan dalam konteks politik saat ini.

1. **Pemahaman tentang Praktik Money Politics** Dari hasil penelitian, terlihat bahwa 99% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui apa yang dimaksud dengan praktik *money politics*. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memiliki kesadaran terhadap isu ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman yang mendalam. Meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang istilah tersebut, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dan konsekuensi dari praktik *money politics*. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu ini, agar mahasiswa tidak hanya mengetahui istilahnya, tetapi juga memahami dampak yang ditimbulkan dalam konteks sosial dan politik.
2. **Frekuensi Mendengar Isu Money Politics** Sebagian besar responden (67%) melaporkan bahwa mereka sering atau sangat sering mendengar atau membaca isu mengenai *money politics* di lingkungan kampus atau media. Ini menunjukkan bahwa isu ini cukup relevan dan sering dibahas di kalangan mahasiswa. Namun, meskipun frekuensi paparan terhadap isu ini tinggi, hal ini tidak selalu menjamin pemahaman yang baik. Oleh karena itu, penting untuk



mendorong diskusi yang lebih kritis dan mendalam mengenai *money politics* di dalam kelas maupun di luar kelas. Diskusi ini dapat melibatkan analisis kasus nyata, sehingga mahasiswa dapat melihat bagaimana praktik ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. **Tingkat Pemahaman terhadap Konsep Money Politics** Hasil menunjukkan bahwa 59% responden tidak paham mengenai konsep *money politics*, sementara hanya 29% yang merasa paham. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan pemahaman. Kesenjangan ini dapat diatasi dengan mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi panel yang membahas secara mendalam tentang *money politics*, termasuk contoh-contoh nyata dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan cara ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan analitis terhadap isu ini.
4. **Dampak Money Politics terhadap Integritas Demokrasi** Ketika ditanya tentang dampak penggunaan uang dalam politik, 69% responden setuju bahwa praktik ini dapat merusak integritas demokrasi. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh *money politics*. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya menjaga integritas dalam proses politik dan bahwa mereka memahami bahwa praktik ini dapat mengarah pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kesadaran ini penting untuk mendorong tindakan kolektif dalam melawan praktik yang merugikan. Dengan memahami dampak negatif tersebut, mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dalam advokasi kebijakan yang transparan dan akuntabel.
5. **Pengaruh Faktor Ekonomi dan Pendidikan** Sebagian besar responden (62%) setuju bahwa faktor ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi terjadinya praktik *money politics*. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa kondisi sosial-ekonomi dapat mempengaruhi perilaku politik. Dengan demikian, untuk mengatasi *money politics*, perlu ada perhatian lebih terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang terdidik dan sejahtera cenderung lebih mampu menolak praktik-praktik yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama dalam meningkatkan akses pendidikan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.
6. **Tanggung Jawab untuk Mengkritisi dan Mencegah** Hasil menunjukkan bahwa 53% responden merasa memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan mencegah praktik *money politics*. Ini adalah sinyal positif, karena menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya pasif, tetapi juga berkeinginan untuk terlibat dalam upaya menciptakan perubahan. Namun, tantangan tetap ada dalam hal bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pencegahan praktik tersebut. Oleh karena itu, perlu ada dukungan dari institusi pendidikan untuk memfasilitasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang berfokus pada pencegahan *money politics*. Misalnya, kampus dapat mengadakan program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan advokasi dan pendidikan politik di komunitas mereka.



7. **Dampak Negatif terhadap Kebijakan Publik** Mayoritas responden (59%) setuju bahwa praktik *money politics* berdampak negatif terhadap kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari bahwa praktik ini tidak hanya mempengaruhi proses politik, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Kesadaran ini penting untuk mendorong tindakan yang lebih proaktif dalam menanggulangi isu ini. Dengan memahami dampak negatif tersebut, mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dalam advokasi kebijakan yang transparan dan akuntabel. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong reformasi dalam sistem politik dan kebijakan publik.
8. **Keterlibatan dalam Upaya Pencegahan** Terakhir, 63% responden merasa terlibat dalam upaya mencegah praktik *money politics*. Ini menunjukkan adanya potensi untuk membangun gerakan mahasiswa yang lebih kuat dalam menanggulangi isu ini. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa, diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih sehat dan demokratis. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye kesadaran, diskusi publik, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *money politics* serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan pandangan mahasiswa terhadap praktik *money politics*. Meskipun terdapat kesadaran yang tinggi, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel, serta untuk memastikan bahwa suara mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan politik yang efektif dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam isu-isu politik akan menjadi kunci dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai praktik *money politics*, meskipun terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 99% responden mengetahui istilah *money politics*, yang mencerminkan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan mahasiswa terhadap isu-isu politik yang berpotensi mempengaruhi integritas demokrasi. Namun, meskipun pengetahuan tersebut ada, 59% responden mengaku tidak paham mengenai konsep *money politics* secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan dasar, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dan konsekuensi dari praktik tersebut. Sebagian besar responden (67%) melaporkan bahwa mereka sering atau sangat sering mendengar atau membaca isu mengenai *money politics* di lingkungan kampus atau media. Namun, tingginya frekuensi paparan terhadap isu ini tidak selalu menjamin pemahaman yang baik. Mayoritas responden (69%) setuju bahwa praktik *money politics* dapat merusak integritas demokrasi, dan



59% responden percaya bahwa praktik ini berdampak negatif terhadap kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya menjaga integritas dalam proses politik dan memahami bahwa praktik ini dapat mengarah pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap praktik *money politics* meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, dan informasi yang diperoleh dari media. Sebagian besar responden (62%) setuju bahwa faktor ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat berperan dalam terjadinya praktik ini. Selain itu, 53% responden merasa memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan mencegah praktik *money politics*, yang menunjukkan adanya potensi untuk membangun gerakan mahasiswa yang lebih kuat dalam menanggulangi isu ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang lebih mendalam dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses demokrasi untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa, diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih sehat dan demokratis, serta memastikan bahwa suara mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basarah, B., & Hasanah, U. (2024). Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum. *Journal Of Law And Social Society*, 1(2), 14-28.
- Chandra M J A., Jamaludin G. (2020) 'Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas', *Jurnal Wajah Hukum*, 4(1), pp. 52-66.
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara party-id dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara party-id dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Nur, I. T., & Simanjuntak, V. Y. (2024). Reformulasi Undang-Undang Pilkada: Upaya Penanganan Praktik Money Politic di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 45-52.
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.
- Siahaan, P. G., Purba, N. R., Natasya, M., Naibaho, C. robert, & Manurung, N. olivia B. (2024). Pengaruh Tindakan Money Politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 424–431. <https://doi.org/10.36805/civics.v9i1.7192>



- Sofia, A., Simanungkalit, D., Sitepu, E. M. R., Sihombing, F. T., Sinaga, R. D. F., & Lumbansiantar, R. (2023). Realita Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik. *MULTISCIENCE: Jurnal Multidisipliner*, 1(1), 31-37.
- Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4154>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Wou, A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(1), 8–14. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i1.58>
- Yanuar, F., Sya, A., & Zid, M. (2024). Pendekatan Geografi dalam Menangani Konflik Politik dan Ekonomi Antar Wilayah Negara. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4324-4328.
- Zain S S., Agus M F. (2021) ‘Rasionalitas Mahasiswa Berpartisipasi dalam Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa Kenep’, *Jurnal Hukum Tora*, 7(2), pp. 299-305.